

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini secara keseluruhan bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana faktor-faktor strategis mendorong reorientasi kebijakan pertahanan Australia di kawasan Indo-Pasifik pada periode 2021–2024. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang telah dipaparkan dalam pembahasan, penelitian ini menemukan bahwa reorientasi kebijakan pertahanan Australia bukan merupakan hasil dari satu faktor saja yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan sebagai hasil dari proses penyesuaian strategis yang kompleks terhadap perubahan lingkungan keamanan yang semakin tidak pasti. Dalam proses penyesuaian tersebut terdapat faktor-faktor strategis yang mendorongnya antara lain berasal dari eksternal dan internal. Faktor-faktor strategis tersebut kemudian saling berinteraksi hingga membentuk opsi kebijakan yang mendorong postur pertahanan Australia. Dengan demikian, perubahan orientasi ini menandai transformasi paling fundamental dalam postur pertahanan Australia. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini telah berhasil menjawab rumusan masalah dengan mengimplementasikan teori Two Level Games dari Putnam dan Konsep Transgovernmental Interaction dari Knopf untuk mendorong sedikit terjadinya reorientasi.

Melalui kerangka teori Two-Level Games dari Putnam, penelitian ini berhasil memperlihatkan bahwa faktor-faktor strategis itu berasal dari eksternal (sistem internasional) dan internal (domestik). Terlihat bahwa faktor strategis pertama yang mendorong reorientasi kebijakan pertahanan Australia itu berasal dari eksternal yaitu Agresivitas Tiongkok yang meningkat di kawasan Indo-Pasifik. Modernisasi militer Tiongkok yang pesat, termasuk perluasan angkatan lautnya menjadi yang terbesar di dunia serta tindakannya seperti inisiasi *Belt Road Initiative* di Pasifik Selatan, wacana pembangunan pangkalan militer di Vanuatu, serta pengembangan rudal jarak jauh yang dapat mencapai Australia, semakin memperkuat persepsi Australia akan adanya ancaman langsung. Karena itu, Australia mulai melihat bahwa pendekatan lamanya yang berhati-

hati dan defensif tidak lagi cukup. Setelah faktor strategis pertama berhasil diidentifikasi akhirnya muncul faktor kedua yang masih berasal dari eksternal, ini merupakan faktor yang dihasilkan dari tekanan faktor pertama yaitu konvergensi kepentingan strategis antara Amerika Serikat dan Inggris yang masing-masing diartikulasikan melalui doktrin *Integrated Deterrence* dalam *National Defense Strategy 2022* dan strategi *Indo-Pacific Tilt* yang termuat dalam *Integrated Review 2021*. Keselarasan kedua kebijakan tersebut dalam hal orientasi kawasan dan tujuan pencegahan terhadap agresivitas Tiongkok membentuk fondasi konvergensi kebijakan yang kemudian diwujudkan secara konkret dalam aliansi pertahanan trilateral AUKUS pada 16 September 2021.

Faktor strategis berikutnya berasal dari internal atau domestik Australia itu sendiri. Dimana, dinamika politik domestik Australia memainkan peran yang tidak kalah penting dalam mendorong reorientasi kebijakan pertahanan tersebut, terutama cara para elite politik memandang ancaman regional dan mengevaluasi kembali kemampuan pertahanan negara. Di bawah kepemimpinan Scott Morrison, Tiongkok digambarkan sebagai ancaman serius terhadap keamanan, kedaulatan, dan tatanan demokrasi Australia, yang membantu membangun narasi untuk dukungan publik terhadap kebijakan pertahanan yang lebih kuat, termasuk AUKUS. Meskipun Anthony Albanese kemudian mengadopsi pendekatan diplomatik yang lebih rasional terhadap Tiongkok, pemerintahannya tetap melanjutkan AUKUS dan mempercepat modernisasi militer melalui “*Optimal Pathway*” 2023, yang menunjukkan kesinambungan kebijakan yang kuat yang didukung oleh konsensus bipartisan dan persetujuan publik. Pergeseran ini juga dipercepat oleh faktor strategis seperti kegagalan proyek kapal selam *Prancis* senilai AU\$90 miliar, yang menghadapi penundaan, biaya yang meningkat, manfaat terbatas bagi industri pertahanan Australia, serta keraguan mengenai efektivitas kapal selam diesel-listrik konvensional dalam menghadapi kekuatan maritim Tiongkok yang semakin besar. Akibatnya, kapal selam bertenaga nuklir di bawah AUKUS dipandang lebih sesuai dengan kebutuhan Australia akan daya tahan, dan proyeksi kekuatan jarak jauh yang lebih besar, sehingga pembatalan kontrak *Prancis* oleh Morrison bukan sekadar

keputusan pengadaan senjata, melainkan langkah besar menuju strategi pencegahan yang lebih canggih dan berorientasi masa depan.

Dengan menggunakan teori Two Level Games dari Putnam dan konsep Transgovernmental Interaction dari Knopf, penelitian ini menemukan bahwa interaksi antara faktor strategis yang berasal dari eksternal dan internal menciptakan ruang win-set yang relatif besar bagi Australia dalam konteks AUKUS. Konvergensi kebijakan dalam kerangka AUKUS ini tidak dibentuk secara tiba-tiba oleh para pemimpin eksekutif, tetapi sebelum terjadinya interaksi negosiasi formal antara ketiga negara melalui konsep transgovernmental bisa dikatakan dapat mempercepat sedikit adanya hubungan yang disebabkan oleh agenda pejabat militer dan pertahanan yang telah terjadi sebelumnya, seperti terlihat dari kontak antara Laksamana Muda Michael Noonan dan Laksamana Tony Radakin pada Maret 2021, hingga terjadinya Level I yaitu pembicaraan tingkat eksekutif pada KTT G7 pada Juni 2021 sebelum pengumuman resminya pada September 2021. Di domestik, dukungan bipartisan dari Koalisi Liberal-Nasional dan Partai Buruh, bersama dengan dukungan publik sebesar 67% yang dilaporkan oleh Lowy Institute pada tahun 2025, membantu Australia meratifikasi dan mempertahankan AUKUS dengan sedikit perdebatan. Komitmen ini semakin diperkuat melalui lembaga dan peraturan baru, seperti *Australian Submarine Agency*, *the Australian Naval Nuclear Power Safety Act 2024*, dan negosiasi jaminan nuklir dengan IAEA, menjadikan AUKUS sebagai pengimplementasian kebijakan pertahanan jangka panjang yang dapat diratifikasi tanpa hambatan.

Secara keseluruhan, reorientasi pertahanan Australia pada periode 2021–2024 menandai pergeseran besar dari pendekatan pertahanan “*Continental Defence*” yang bersifat defensif menuju implementasi “*Strategy of Denial*” yang menekankan *forward deterrence* dan kemandirian sebagai prioritas utama dalam *National Defence Strategy 2024*. Melalui AUKUS, Australia tidak hanya berhasil memperkuat kapabilitas militer maritimnya melalui rencana akuisisi kapal selam bertenaga nuklir kelas Virginia dan SSN-AUKUS, tetapi juga telah mentransformasikan dari sekedar “*security consumer*” yang sangat bergantung

pada Amerika Serikat menjadi "*security contributor*" yang lebih aktif dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik. Keterlibatan yang semakin mendalam dalam *Quadrilateral Security Dialogue* (Quad) serta komitmen pada tatanan internasional berbasis aturan semakin mempertegas posisi Australia sebagai negara *middle power* maritim yang berupaya menjaga stabilitas kawasan di tengah persaingan strategis kekuatan besar.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademis

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas analisis mengenai reorientasi kebijakan negara-negara *middle power* di kawasan Indo-Pasifik dengan menggunakan kerangka Two-Level Games secara komparatif. Kasus Australia menunjukkan bahwa perubahan kebijakan pertahanan tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan eksternal, tetapi juga oleh dukungan domestik, persepsi elite politik, kepentingan industri pertahanan, dan legitimasi publik. Oleh karena itu, penelitian mendatang dapat membandingkan dinamika Australia dengan negara lain seperti Jepang, India, Korea Selatan, atau bahkan Indonesia untuk mengetahui apakah pola interaksi antara faktor eksternal dan domestik juga terjadi secara serupa dalam perubahan kebijakan pertahanan negara-negara tersebut. Perbandingan semacam ini akan memperkaya aplikasi teori Putnam dalam menjelaskan dinamika aliansi keamanan multilateral di tengah persaingan kekuatan besar abad ke-21. Dalam kerangka teoritis, penelitian berikutnya juga disarankan untuk mengembangkan kerangka analisis lintas-teori yang lebih komprehensif dengan menggabungkan Two-Level Games dari Putnam selain konsep Transgovernmental dari Knopf misalnya pendekatan konstruktivis atau analisis kebijakan luar negeri berbasis persepsi ancaman untuk menjelaskan argumen yang lebih komprehensif.

Penelitian ini diharapkan dapat mendorong kajian-kajian akademis selanjutnya untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam bagaimana konvergensi kebijakan pertahanan antara Amerika Serikat, Inggris, dan Australia dalam kerangka AUKUS berinteraksi dengan mekanisme

keamanan multilateral lainnya seperti Quad, Five Eyes, dan diranah ASEAN. Selain itu, kajian akademis mendatang perlu memberi perhatian yang lebih besar pada dampak AUKUS terhadap negara-negara Asia Tenggara dan arsitektur keamanan kawasan secara menyeluruh. Reorientasi pertahanan Australia tidak hanya berdampak pada hubungan trilateral Australia–Amerika Serikat–Inggris dan pada relasi strategis dengan Tiongkok, tetapi juga memengaruhi secara langsung persepsi keamanan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia dan Malaysia, yang telah menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi perlombaan senjata dan *security dilemma*. Dengan memperluas sudut pandang analisis melampaui aktor-aktor besar, literatur mengenai AUKUS dan kebijakan pertahanan Australia akan menjadi lebih komprehensif dan dapat memberikan kontribusi praktis yang lebih bermakna bagi perumusan kebijakan luar negeri negara-negara kawasan, khususnya Indonesia, dalam menavigasi dinamika Indo-Pasifik yang semakin kompleks.

6.2.2 Saran Praktis

Pada saran praktis, penelitian ini dapat berkontribusi bagi para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di Indonesia, penelitian ini memberikan beberapa implikasi praktis yang perlu dicermati secara serius. Kehadiran AUKUS sebagai pakta pertahanan trilateral yang menekankan *deterrence* berbasis kemampuan kapal selam bertenaga nuklir di kawasan Indo-Pasifik memiliki potensi menciptakan *security dilemma* yang dapat mendorong eskalasi perlombaan senjata regional. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara dengan pengaruh strategis di ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik disarankan untuk secara aktif mendorong dialog multilateral melalui forum-forum seperti ASEAN *Defence Ministers' Meeting Plus* dan *East Asia Summit* guna memastikan bahwa penguatan kemampuan pertahanan Australia dalam kerangka AUKUS tetap dapat dikelola dalam batas-batas yang tidak mengganggu stabilitas strategis kawasan.

Bagi Pemerintah Australia, penelitian ini diharapkan untuk merekomendasikan agar pengelolaan komunikasi strategis terkait

AUKUS kepada mitra-mitra regional dilakukan dengan lebih inklusif dan transparan. Kekhawatiran negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia dan Malaysia, terhadap potensi perlombaan senjata dan destabilisasi kawasan yang ditimbulkan oleh AUKUS merupakan sinyal diplomatik yang tidak boleh diabaikan. Australia disarankan untuk secara proaktif memperluas keterlibatan diplomatiknya dengan negara-negara ASEAN melalui dialog bilateral yang substansial guna menjelaskan komitmen non-proliferasi nuklirnya dan memastikan bahwa transformasi kemampuan pertahanannya tidak dipersepsikan sebagai ancaman oleh tetangga-tetangganya di kawasan.

Bagi para akademisi dan analis kebijakan di Indonesia, serta Asia Tenggara secara lebih luas, penelitian ini menyoroti pentingnya memahami dengan lebih baik situasi keamanan yang semakin kompleks di kawasan Indo-Pasifik. Lembaga think tank dan para akademisi di kawasan ini perlu melakukan lebih banyak penelitian mengenai bagaimana AUKUS dan perubahan geopolitik yang lebih luas dapat memengaruhi kepentingan nasional masing-masing negara. Mereka juga perlu mengembangkan perspektif alternatif yang berfokus pada diplomasi, keamanan kooperatif, serta cara-cara damai untuk mengelola persaingan di antara negara-negara adidaya. Dengan pemahaman yang lebih kuat dan berbasis bukti, negara-negara di kawasan ini akan lebih siap untuk merumuskan kebijakan yang tepat, fleksibel, dan sejalan dengan kepentingan nasional mereka di tengah perubahan geopolitik yang sedang berlangsung.